

# MULTIVERSA

Journal of International Studies

Volume 02, No. 1, Februari 2011

## the Politics of Global Environment

Globalization and Environmental Reform in Developing  
Countries: Potentials and Limits of Ecological Modernization  
*Maharani K. Hapsari*

Teori Hijau: Sebuah Alternatif dalam Perkembangan Teori  
Hubungan Internasional  
*Aprivan*

Copenhagen Accord: Sebuah Kemajuan Kompromi Politik  
Hukum Internasional Perubahan Iklim  
*Annisa Paramita Wiharani*

Pergulatan Kepentingan Nasional Atas Protokol Kyoto:  
Studi Kasus AS, Australia, dan Kanada  
*Falkhurrohman*

Small Island Tourism and Climate Change: From the  
Perspectives of Policy Makers and Tourism Entrepreneurs  
*Ahlihan urqan & Ahmad Puad Mat Som*

Urgensi Posisi Cina dalam Problematika Lingkungan Global  
*Juendra A. Samodra*



Institute of  
International  
Studies



Fakultas Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Gadjah Mada

# Teori Hijau: Alternatif dalam Perkembangan Teori Hubungan Internasional

Apriwan<sup>1</sup>

## Abstract

*This article examines how the environmental problems have the impact to the dynamic of international relation theories. How the ecological crises has encouraged emerging the green theory in social and political sciences, and in international relations as well. For three decades, this term has been an alternative approach for understanding and examining environmental problems at international level. Before, liberal approach was foremost to explain it. It focused on how the states system faces the environmental problems. According to them, it needs a international regime for dealing the problems. It will be an effective tool to resolve the problems, because they really optimistic to the states system which provides the international regime itself. At the same time as, Green thought rejected the idea about the state systems and the other world political structures can deal with the problems. For them, world environmental problems is a part of the state system itself.*

## Keywords:

*green politics, green theory, environmental change, international relations theory*

## Pendahuluan

Permasalahan lingkungan hidup (ekologi) selama dekade 60-an dan 70-an mulai menjadi isu global dalam masyarakat dunia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Apriwan adalah Staf Pengajar pada Departemen Hubungan Internasional FISIP, Universitas Andalas, Padang.

Suara-suara protes yang awalnya hanya dari kalangan minoritas pecinta lingkungan seperti ilmuwan, aktivis dan kelas menengah, kini telah mampu membawa isu ini menjadi perhatian masyarakat internasional. Hal ini bisa dilihat dari realisasi konferensi Lingkungan Hidup PBB untuk pertama kalinya pada tahun 1972 di Stockholm yang membahas Hukum Internasional Lingkungan. Sejak saat itu, kerjasama Internasional dalam permasalahan lingkungan hidup dimulai oleh negara-negara maju dan berkembang. Bahkan, konferensi ini juga membuka debat internasional mengenai permasalahan lingkungan hidup.

Di samping itu, aktivis gerakan lingkungan hidup terus tumbuh dan berkembang, khususnya di kawasan Eropa dan Amerika. Mereka mengancam modernitas, dengan produk industrialisasinya, sebagai salah satu penyebab terjadinya permasalahan lingkungan yang semakin akut. Sebagai contoh, kelemahan utama dari cara hidup masyarakat industri dengan “etos” ekspansi adalah cara hidup yang tidak *sustainable* dari saat ini dan saat yang akan datang.

---

<sup>2</sup> Gejala-gejala lingkungan hidup (ekologi) yang sekarang terjadi seperti: (a) Lapisan ozon yang melindungi bumi pada garis lintang utara bumi yang padat penduduknya menipis dua kali lipat lebih cepat daripada yang diperkirakan oleh para ilmuwan beberapa tahun sebelumnya; (b) Sekurang-kurangnya 140 jenis tumbuh-tumbuhan dan hewan punah setiap harinya; (c) Tingkat karbon dioksida di atmosfer yang merupakan perangkap panas, sekurang 26% lebih tinggi daripada konsentrasi dari zaman pra industri dan kinipun masih tetap meningkat; (d) Permukaan bumi lebih panas dalam tahun 1990 daripada tahun sebelumnya sejak pencatatan mulai dilakukan pada pertengahan abad kesembilan belas, dan enam dari tujuh tahun-tahun yang tercatat paling panas terjadi sejak tahun 1980; (e) Hutan-hutan lenyap dengan kecepatan sekitar 17 hektare pertahun, suatu kawasan yang luasnya kira-kira setengah hari luasnya seluruh luasnya negara Finlandia. Penduduk bumi bertambah dengan 92 juta jiwa pertahunnya, kira-kira sama banyaknya dengan penduduk negara meksiko; dari jumlah itu 88 juta orang merupakan penambahan penduduk di negara berkembang. Lihat Brown, Lester R, (ed), *Jangan biarkan bumi merana*, Laporan World watch Institute, Yayasan Obor Indonesia, 1992, hal. 2. Lihat juga “Greens Century”, *Time*, 2 September, 2002.

Maka, tindakan radikal untuk mempertahankan lingkungan sangat diperlukan. Sebab, pertumbuhan jumlah penduduk dunia saat ini kian pesat dan pendapatan per kapita juga semakin meningkat. Di sisi lain, semakin rusaknya sistem lingkungan serta berkurangnya sumber daya alam merusak sendi-sendi dasar bumi untuk mampu bertahan hidup. Dengan sendirinya, bumi tidak mampu lagi menampung semua tuntutan ekologi yang kian meningkat. Pertumbuhan apapun yang *tanpa batas* tidak akan dapat dilestarikan dengan sumber daya yang *terbatas*. Inilah simpul yang sangat kuat dari posisi kurang menguntungkan bagi lingkungan hidup.<sup>3</sup>

### Sejarah Gerakan Lingkungan

Gerakan lingkungan hidup yang muncul dan berkembang pada dekade 70-an dan 80-an mendapat dukungan publik yang belum pernah sedemikian kuatnya selama abad ini. Alasan pertama adalah bahwa kelompok-kelompok kepentingan yang bermunculan di sekitar masalah lingkungan merupakan kelompok yang sangat mengedepankan kepentingan masyarakat umum. Mereka tidak mengedepankan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Di sisi lain, independensi terjaga dengan jelas karena ada garis-batas antara kelompok mereka dengan kekuasaan. Sehingga, dukungan publik yang begitu luas memberi pengaruh politis.

Alasan kedua adalah bahwa jumlah kelompok atau organisasi lingkungan baik kecil maupun besar, nasional maupun sampai transnasional, merupakan kelompok yang bertumbuh pesat dalam jumlah organisasinya. Awalnya, pada awal 1970, jumlah anggota mereka hanya beberapa ratus orang. Namun, jumlah ini meningkat menjadi 3000-an pada dalam jangka

---

<sup>3</sup> Kirk Patrik Sale, *Revolusi Hijau: Sebuah Tinjauan Historis-krisis Gerakan Lingkungan Hidup di Amerika*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996), 36.

waktu yang tidak panjang, hingga kini berjumlah jutaan orang di seluruh negeri, dengan berbagai corak kegiatan.<sup>4</sup>

Kelompok-kelompok gerakan lingkungan hidup tersebut memiliki berbagai variasi kegiatan.<sup>5</sup> Seiring dengan itu, muncul pula aktivisme radikal sayap kiri turunan Marxisme, seperti *new left* (kiri-baru), *feminisme*, bahkan sampai *anarchisme* yang mengkritik modernitas. Mereka beranggapan bahwa proyek industrialisasi telah menimbulkan permasalahan baru dalam kalangan umat manusia. Seperti kritik Max Horkheimer dan Theodor Adorno dalam *Dialektik` der Aufklarung* (Dialektika Pencerahan), dengan tegas mereka melontarkan bahwa berbagai industri kebudayaan *ala* pencerahan tidak lebih sebagai penipuan massal.

Ketika film-film dan radio tidak lagi berpretensi seni, berbagai teknologi, mesin penjawab bukan lagi diasumsikan sebagai pencapaian rasionalitas modernitas, tetapi tidak lebih dari bagian pengekanan atas mitos-mitos baru. Pengukuhan kapitalisme sebagai ide utama dalam masyarakat modern menjadi kritik utama dari kelompok intelektual yang kerap disebut sebagai mazhab Frankfurt ini. Imbasnya, muncul lingkaran manipulatif kebudayaan yang tidak lain dijadikan komoditas industrialisasi yang punya nilai jual beli. Posisi tersebut tidak lagi menempati porsi sesungguhnya, yaitu untuk menjadikan manusia sebagai makhluk yang bermartabat.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid*, 39.

<sup>5</sup> Gerakan Lingkungan Hidup seperti; 1) *Greenpeace*, dibentuk 1971 sebagai kritik terhadap uji coba nuklir, kemudian melebar dengan kampanye “semalatkan Ikan Paus”, sampai dasawarsa terakhir tetap intens melakukan kampanye sampai masalah hutan tropis dan masalah limbah industri beracun. 2) *World-watch Institute*, sebuah pusat penelitian dan studi, di prakasai oleh Lester Brown pada tahun 1975 untuk mengumpulkan informasi dari seluruh dunia akan masalah-masalah lingkungan.

<sup>6</sup> Theodore Adorno dan Marx Horkheimer, *Dialektika Pencerahan*, terjemahan Ahmad Sahida, (Yogyakarta: IRCISOD, 2002), 24.

Berbagai kelompok radikal tersebut mulai mengkritik kapitalisme melalui pisau analisis lingkungan hidup. Secara sederhana, dalam pandangan mereka, perilaku serakah manusia membuat bukan saja manusia menjadi korban tetapi juga lingkungan tempat manusia itu hidup. Jika lingkungan menjadi korban, bukan manusia yang hidup sekarang saja yang bakal menjadi korban, akan tetapi manusia yang hidup di masa mendatang.

Berawal dari kesadaran tersebut, gerakan-gerakan lingkungan yang berasal dari tradisi kiri mulai marak bermunculan awal 1970-an. Gerakan ini terinspirasi dari akademisi dan ilmuwan yang sadar terhadap krisis lingkungan. Sebelumnya, gerakan ini hanya menyadarkan diri pada kritik Marx terhadap kapitalisme. Menurut Marx, kepemilikan adalah sumber dari segala bencana selama manusia masih melakukan praktik penghisapan atas kerja-kerja yang dilakukan kaum buruh, atau dengan kata lain, kaum miskin.

Sehingga, menjadi klop ketika komunisme memperoleh kecemasan masyarakat dunia dan mulai ditinggalkan karena pada dasarnya tidak membebaskan manusia dari ketertindasan kapital, banyak mahasiswa gerakan radikal tersebut mencari wacana alternatif, seperti menggunakan isu lingkungan sebagai *platform* gerakan mereka untuk mengkritik proyek-proyek kapitalisme.

Senada dengan gerakan itu pula, isu lingkungan pun menjadi komoditas dalam ranah politik, baik dalam tingkatan lokal, nasional bahkan internasional. Politik lingkungan yang lebih sering disebut politik hijau (*Green Politics*) mulai melakukan perubahan-perubahan. Gerakan yang pada awalnya hanya berbentuk gerakan aksi, mencoba melembagakan diri ke dalam bentuk partai politik. Asumsinya, gerakan aksi *an sich* tidak cukup untuk mempengaruhi proses pengambilan kebijakan. Sehingga, dibutuhkan institusi seperti partai politik yang bisa menjadi bagian pengambilan kebijakan di level nasional atau lokal (*stakeholder*).

Maka, gerakan politik hijau yang awalnya hanya dalam berbentuk gerakan aksi jalanan akhirnya bermetamorfosis ke dalam bentuk institusi partai. Fenomena ini awalnya berkembang di negara-negara Eropa, Amerika, dan di negara-negara Scandinavia. Di level Eropa, misalnya, perkembangan sangat dinamis terjadi di Republik Federal Jerman. Kesuksesan Partai Hijau (*Bundnis 90/Die Grunen*) menjadi inspirasi bagi gerakan-gerakan lingkungan di berbagai negara lain. Partai ini kerap disebut dengan *THE MOTHER OF GREEN PARTY* – panggilan yang diberikan oleh partai hijau sedunia bagi *Die Grunen*.

Ada beberapa partai politik di negara lain yang juga menempuh jalan serupa. *Green Party United State Of America* (GPUUSA), misalnya, yang awalnya dibentuk sebagai *Committes Of Correspondence* pada suatu pertemuan di Minneapolis pada tahun 1984, meniru model organisasi serupa di Jerman, *German Greens*, yang pada tahun sebelumnya berhasil memenangkan 27 kursi di Parlemen Jerman (Bundestag).<sup>7</sup> Begitu pula beberapa partai lain yang menggunakan jalur politik formal.

## Gerakan Lingkungan dan Politik Hijau

Pendekatan yang paling populer untuk menjelaskan munculnya fenomena gerakan hijau (*The Greens*) tercakup pada terminologi perubahan struktur sosial dan perubahan prioritas nilai dalam masyarakat pascaindustri.<sup>8</sup> Pandangan ini berawal dari

---

<sup>7</sup> Kirk Patrik Sale, *Op cit*, 87.

<sup>8</sup> Secara sederhana Pamikiran Hijau melihat dunia seperti berikut: (a) Kelompok pemikir hijau menuntut perubahan secara radikal pada pola organisasi sosial politik dan adanya penghargaan terhadap spesies non-manusia; (b) Penolakan terhadap pandangan dunia yang anthropocentric; (c) Penolakan terhadap strategi pembangunan yang menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai standar kualitas kehidupan; (d) Mereka percaya bahwa karena ulah manusia lah yang telah menciptakan ancaman bagi keberlangsungan umat manusia dan spesies lainnya; (e) Perlu adanya perubahan yang fundamental

munculnya sekelompok kalangan kelas menengah baru yang memikirkan nasib Eropa Barat di bawah kondisi sosial yang relatif makmur dan damai. Orientasi nilai yang mereka miliki tidak selamanya bersesuaian dengan paradigma tradisional kiri-kanan, seperti terjadi dalam spektrum ideologi politik tradisional.

Menurut Ronald Inglehart yang dikutip dari penelitiannya pada level nasional, kehadiran *the greens* merupakan fenomena pasca-materialisme (*post materialism*) yang berargumen bahwa fenomena ini tidak bisa lepas dari adanya kecenderungan perubahan dalam masyarakat pasca industri. Pada titik itu, terjadi pergeseran dari "nilai-nilai kelangkaan" ke nilai-nilai "pascamaterialis", dan sekaligus perubahan distribusi nilai-nilai yang tidak sesuai dengan jalur-jalur kelas seperti dikotomi kiri-kanan.

Dengan mengumpulkan materi survei dari serangkaian negara industri, Inglehart menunjukkan bahwa nilai-nilai pencapaian dan pertumbuhan ekonomi memudar seiring meningkatnya kemakmuran, sehingga masyarakat memperlihatkan lebih besarnya sensitivitas mereka akan isu kualitas hidup, yang menyangkut seperti lingkungan, nilai-nilai kebebasan berekspresi dan partisipasi<sup>9</sup>.

Lebih lanjut, Politik Hijau merupakan isu baru dalam kamus politik kontemporer. Perkembangan gerakan politik ini tidak hanya muncul dan berkembang dalam fora politik nasional, tetapi sudah ikut berkembang dalam tingkatan regional bah-

---

dalam struktur sosial, ekonomi dan politik serta ideology dan sistem nilai; (f) Pemisahan yang tegas antara kebutuhan vital dan non-vital; (g) Perlu adanya etika yang didasarkan pada "nilai teori hijau" yang menempatkan sebuah nilai intrinsik pada kehidupan non-manusia; (h) Perlu adanya komitmen yang proaktif untuk perubahan signifikan demi mencapai masa depan lingkungan, termasuk mempromosikan gaya hidup alternative, norma dan nilai serta desentralisasi kekuasaan.

<sup>9</sup> E. Gene Frankland & Donal Schoomaker, *Between Protest and Power: The Green Party in Germany*, (Oxford: Westview Press, 1992), 3.

kan global (politik internasional). Di tingkat Uni Eropa, Partai Hijau ikut berperan di Parlemen Eropa seperti *Le Verst* dari Perancis yang bergabung dengan *Bundnis90/The Grunen* dari Jerman. Bahkan, gebrakan-gebrakan Politik Hijau ini juga mempengaruhi hubungan antar negara (Kasus terakhir, dinamika politik antara Jerman dengan Amerika Serikat dalam masalah Irak, tidak terlepas dari peran partai Hijau Jerman) dan organisasi-organisasi internasional lainnya, seperti PBB.

Menurut Tim Hayward, perkembangan teori Politik Hijau (*Green political theory*) diambil dari fakta bahwa manusia merupakan bagian dari alam, sehingga yang memiliki implikasi bagi perilaku politiknya. Dengan argumen ini, teori politik juga harus selaras dengan teori-teori lingkungan. Artinya, manusia tidak hanya dilihat sebagai individu yang rasional (seperti dalam pandangan liberalisme) atau sebagai makhluk sosial (seperti pandangan sosialisisme) akan tetapi sebagai *natural beings*, dan lebih jauh sebagai *political animals*.<sup>10</sup>

Sedangkan menurut Mathew Patterson, perlu untuk membedakan antara *green politics* dan *environmentalism*. Environmentalis menerima kerangka kerja yang eksis dalam realitas politik, sosial, ekonomi, serta struktur normatif yang ada dalam dunia politik. Gerakan ini mencoba memperbaiki masalah lingkungan dengan struktur yang sudah ada. Sementara itu, *Politik Hijau* menganggap bahwa struktur-struktur yang sudah ada tersebut justru menjadi dasar utama munculnya krisis lingkungan. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa struktur ekonomi-sosial-politik memerlukan perubahan dan perhatian yang lebih utama.<sup>11</sup>

**Figure 1**, memperlihatkan perbedaan antara pola gerakan lingkungan hidup yang di dasarkan pada ideologi politik mau-

---

<sup>10</sup> Tim Harward, *green political theory*, Unuversity of Edinburd, diakses dari <http://www.psa.ac.uk/cps/1996/hayw.pdf> pada tanggal 17 oktober 2002.

<sup>11</sup> Mattew Patterson, *Green Political* dalam Scoot Burchill & Andrew Linklater (ed), *International Relation Theory*, (New York: St. Martin's Press. Inc, New York, 1996), 252.

pun ideologi ekonomi. Gerakan lingkungan hidup ini dibedakan antara *gerakan lingkungan radikal* dan *gerakan lingkungan reformis*.<sup>12</sup>

Kelompok reformis berangkat dari pandangan umum ideologi budaya liberalisme, demokrasi (seperti dipraktikkan oleh Partai buruh dan Partai Sosial Demokrat), dan sosialisme. Melalui pendekatan ini, mereka mencoba memperbaiki sistem kapitalisme menjadi lebih baik, sebagai reaksi terhadap permasalahan lingkungan. Kelompok ini mengadopsi perspektif yang dikenal dengan teknosentris. Paham teknosentrisme meyakini bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan manajemen ekosistem yang rasional adalah jalan penyelesaian bagi permasalahan lingkungan.

Secara lebih jauh, kelompok ini mempertanyakan keterlibatan negara dalam ekonomi pasar. Ide pasar bebas tidak akan mengurangi pengelompokan kekuatan pasar, sehingga meningkatnya kepemilikan individu terhadap lingkungan akan mempengaruhi kondisi objektif lingkungan itu sendiri. Untuk itu kelompok ini merekomendasikan solusi peningkatan pajak lingkungan (*eco-taxes*), insentif, regulasi perusahaan-perusahaan dan kepemilikan individu.

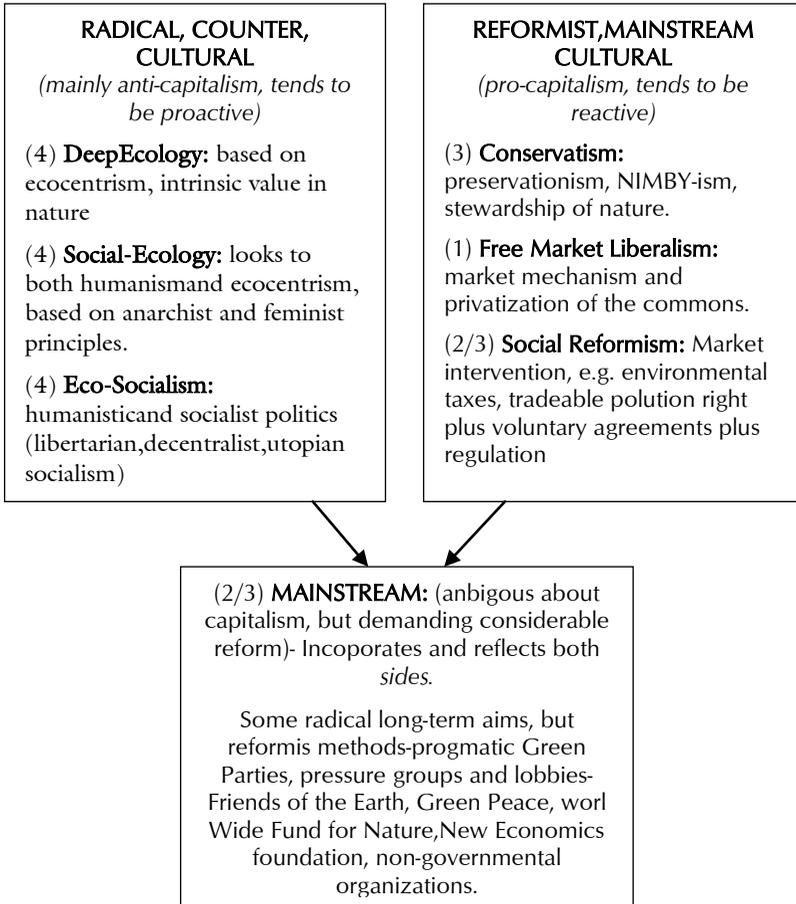
Berangkat dari pandangan yang sama, kelompok konservatif menawarkan proteksi dengan konsep pemeliharaan lingkungan, seperti tertuang dalam program lingkungan Uni Eropa yang dikenal dengan 'prinsip pencegahan'. Mereka menolak kemungkinan pembangunan menghasilkan ketidakpastian terhadap kondisi lingkungan. Konservatif tradisional bersikap sama, dan memanasifasikan sikap mereka dalam sindrom '*Not In My Back Yard*' yang mencoba menyerahkan permasalahan polusi dan kerusakan lingkungan kepada komunitas dan negara. Di

---

<sup>12</sup> David Pepper, Environmentalism, dalam Gary Brownig, etc (ed), *Understanding Contemporary Society (Theories and the Present)*, SAGE Publication, London, 2000, 447.

titik ini, negara dituntut untuk secara luas berperan dalam pengaturan-pengaturan sosial.<sup>13</sup>

Figure 1: Environmentalism and Their Political Ideologies and Approaches



Sumber: David Pepper, *Environmentalism, dalam Gary Brownig, etc ed), Understanding Contemporary Society (theories and The Present), SAGE Publication, London, 2002, 447.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

Bertolak belakang dengan aliran reformis, gerakan lingkungan radikal justru lebih proaktif, melihat permasalahan lingkungan pada akhirnya, lebih dari sekedar reaksi sederhana terhadap kerusakan yang disebabkan oleh kapitalisme global. Untuk itu, mereka berpandangan bahwa diperlukan perubahan sosial yang fundamental, yang salah satunya adalah eliminasi, atau agenda rekonstruksi kapitalisme. Sehingga, perdebatan tentang lingkungan bergeser dari pendekatan kultural-ekonomis menjadi politis-struktural yang sering digambarkan dalam tradisi perlawanan akar-rumput seperti romantisme, anarkisme, sosialisme utopis dan lain sebagainya. Pendekatan ini mencakup:

1. *Social Ecology*, secara garis besar didasarkan pada prinsip anarkis yang terutama di interpretasikan dalam kerja Murray Bockin (e.g. 1990).
2. *Eco-socialism*, bersifat libertarian, desentralistis dan komunalis dalam prinsipnya, berangkat dari pemikiran sosialisme yang pada akhirnya di hadapkan pada negara.
3. *Deep Ecology*, memfokuskan pada perubahan yang fundamental dalam sikap dan nilai terhadap alam. Mengajak masyarakat dimanapun untuk menyesuaikan diri dengan prinsip ekologi (seperti prinsip 'kapasitas memiliki' yang berimplikasi terhadap batasan pertumbuhan penduduk dan ekonomi.<sup>14</sup>

Gerakan lingkungan *mainstream* seperti tertera pada gambar di atas merupakan gabungan dari radikal dan reformis. Seperti asumsi Dobson, terkadang mereka menganjurkan untuk radikal (termasuk ekosentrisme dan oposisi terhadap kapitalisme), tapi juga pragmatis secara politik dengan menyuarakan bahwa solusi utama krisis lingkungan harus direformasi daripada tidak sama sekali. Di satu sisi, mereka melakukan aksi anti-kekerasan secara langsung, namun di sisi lain juga menjadi anggota parlemen. Contoh konkret adalah partai-partai Hijau

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

yang ada di Eropa atau LSM *Friends of The Earth* yang cukup radikal di Amerika.<sup>15</sup>

### Pemikiran Politik Hijau

Di samping itu, ada beberapa pandangan berbeda dalam mendefinisikan karakter dari Politik Hijau. R. Eckersley memberikan karakteristik Politik Hijau dalam kerangka Ekosentrisme, yang menolak pandangan *anthropocentric* bahwa nilai moral berpusat pada manusia. Pandangan ini setuju untuk menempatkan kebebasan nilai pada ekosistem dan seluruh aspek kehidupan.<sup>16</sup> Sementara itu R.E Goddin juga menempatkan etika pada pusat dari posisi politik Hijau. Ia menyatakan bahwa *Green Theory of Value* merupakan pusat dari teori hijau, dengan mengedepankan sumber nilai sebagai fakta dari sesuatu yang dibentuk oleh proses alamiah sejarah, dan lebih daripada sekedar peran manusia.<sup>17</sup>

Lain lagi dengan John Barry, dia melihat bahwa Politik Hijau di dasarkan pada tiga prinsip utama, antara lain:

1. Sebuah teori distribusi (intergenerasional) keadilan
2. Sebuah komitmen terhadap proses demokratisasi, dan
3. Usaha untuk mencapai keberlangsungan ekologi<sup>18</sup>

Tiga prinsip utama ini merupakan konsepsi yang mewakili makna dari pusat Politik Hijau. Prinsip ini digunakan sebagai sarana untuk menjelaskan konsepsi dari teori hijau, seperti dalam memahami kelangsungan dari eko-otoritarianisme yang

---

<sup>15</sup> *Ibid*, 449.

<sup>16</sup> Matthew Patterson, *Op. cit*, 253.

<sup>17</sup> Robert E. Goodin, *Green Political Theory*, Polity Press, (Cambridge, 1992), 37.

<sup>18</sup> John Barry, *Green Political Theory and The State "Discursive Sustainability; The State (and citizen) of Green Political Theory*, diakses dari <http://www.psa.ac.uk/cps/1994/barr.pdf> pada tanggal 17 oktober 2002.

menjadi salah satu usaha keberlanjutan bagi biaya demokrasi dan keadilan sosial.

Di samping itu, A. Dobson mempunyai dua definisi karakteristik dari Politik Hijau. *Pertama*, menolak pandangan antroposentrisme seperti yang diungkapkan oleh Ekscersly. *Kedua*, perlu adanya batasan pertumbuhan, yang merupakan penyebab munculnya krisis lingkungan secara alami. Pandangan Politik Hijau ini merupakan pengalaman dari pertumbuhan ekonomi secara eksponensial selama dua abad terakhir, yang merupakan penyebab dari kerusakan lingkungan yang ada sekarang ini.<sup>19</sup>

Munculnya proyek hijau memperoleh dukungan banyak dari negara-negara Eropa. Dukungan tersebut lebih pesat didapat di kawasa Eropa Utara daripada Eropa Latin. Partai Hijau bertambah kuat di tingkat lokal, seperti '*Die Grunen*' di Jerman Barat. Kelompok ini menjadi yang paling aktif dan disebut sebagai partai induk oleh kelompok lain. Proyek hijau mengindikasikan bahwa sifat gerakan politik ini adalah transnasional, mengingat persoalan yang dihadapi. Isu pertama yang digulirkan adalah perlindungan lingkungan yang menurut pandangan hijau tidak sesuai dengan sistem industrial modern, baik dalam kerangka berpikir sosialisme maupun kapitalisme.

Menurut Rudolf Bahro, meminjam konsep E.P Thomson, ekstremisme adalah ciri umum peradaban Barat (Bahro, 1984). Industrialisasi yang merebak di seluruh dunia akan merusak kehidupan di muka bumi. Namun sebelum hal itu terjadi, kompetisi atas sumber daya yang semakin langka akan meningkatkan ketegangan politik sampai ke titik dimana bencana nuklir akan menjadi destruktif. Jadi isu kedua yang memobilisasi gerakan hijau adalah perdamaian. Ekologi dan perdamaian saling terkait, namun realisasinya membutuhkan transformasi masyarakat.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Bjorn Hettre, *Teori Pembangunan dan Tiga Dunia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 337-338

Dengan demikian masalah dan isu kampanye yang mengaktifkan kelompok hijau berbeda dengan kelompok-kelompok aliran yang lain. Ekologi dan perdamaian merupakan titik acuan bagi semua isu lainnya, dan hal-hal lain harus menyesuaikan diri dengan titik acuan tersebut. Keduanya bukan hanya butir dari program partai dan bukan pula isu kampanye dalam pemilu. Inilah sebabnya proyek hijau layak diperhatikan dalam konteks ini. Dari sudut pandang ini, jumlah suara yang diperoleh tidaklah menjadi hal yang krusial, sebab berpijak pada basis nilai yang kuat.

Politik Hijau atau gerakan ekologi sendiri memiliki sepuluh nilai yang menjadi dasar dan tujuan gerakan dan sekaligus sebagai acuan bagi artikulasi kebijakan politik. Beberapa prinsip ini pada diadopsi secara langsung oleh berbagai partai hijau di dunia seperti *Die Grunen* di Jerman, dan *Green Party of USA*:<sup>21</sup>

### 1. Kesadaran dan keberlangsungan Ekologi

Isu ini merupakan isu paling utama, yang menghubungkan tradisi pencerahan dengan pengalaman batasan industrialism sebagai sebuah kompleksitas kesadaran baru yang diambil dari prinsip-prinsip ekologi. Isu ini berangkat dari asumsi bahwa manusia harus bertindak berdasarkan pemahaman bahwa ia merupakan bagian dari alam dan bukan berada di atas alam lingkungannya. Untuk itu, manusia perlu menjaga keseimbangan ekologi dan hidup dalam keterbatasan sumber daya serta batas-batas ekologi planet bumi.

---

<sup>21</sup> *The Future is Green: Alliance90/The Green (Party Program and Principles)*, hlm. 5-8, diakses dari situs resmi partai hijau Jerman *Alliance/The Green* <http://www.archiv.gruene-partai.de/dokumente/grunsatzprogram-english.pdf> pada tanggal 23 maret 2003. Lihat juga Robert E. Goddin, *Green Political Theory*, (Cambridge: Polity Press 1992), 113-168. Lihat juga pada *Ten Key Value*, diakses dari <http://www.greenparty.org/tenkeyvalue/html> pada tanggal 17 septemver 2002. lihat juga *Partai Hijau nan Menguning: 10 Perintah kaum Ekologi*, suplemen Forum Keadilan No.9, 16 juni 2002.

## **2. Demokrasi Akar Rumput**

Dalam hal demokrasi, kaum ekologi percaya bahwa demokrasi yang sebaik-baiknya harus dipraktikkan di tingkat akar rumput. Artinya, di tingkat masyarakat lokal dan bukan di lembaga perwakilan nasional maupun daerah. Menurut mereka, setiap manusia berhak berpendapat terhadap keputusan yang ikut berpengaruh terhadap hidup mereka. Pun manusia tidak boleh menjadi korban dari keinginan segelintir orang saja. Demokrasi diartikan sebagai *interfase* antara kebebasan berekspresi pada satu pihak dan penghargaan yang sama di pihak lain.

## **3. Keadilan sosial dan Persamaan Kesempatan**

Semua orang memiliki hak dan kesempatan yang sama dari sumber daya yang berasal dari masyarakat dan lingkungannya. Untuk itu, perlu dihilangkan hambatan-hambatan sosial, seperti rasisme, seksualisme dan heteroseksualisme, pertikaian antar kelas, homophobia, serta penelantaran kepentingan orang tua dan orang cacat. Sikap yang memberikan perlakuan yang sama ini harus mendapat perlindungan undang-undang negara.

## **4. Anti kekerasan**

Menyangkut pluralitas manusia, penting untuk dikembangkan alternatif yang efektif terhadap kebiasaan masyarakat kini dalam menggunakan kekerasan. Untuk itu, pandangan ini memperjuangkan proses demiliterisasi dan penghilangan senjata destruktif masal di dalam negerinya sendiri, tanpa berniat nanif terhadap niat buruk negara lain. Kendati, pandangan ini juga mengakui bahwa tindakan mempertahankan diri dari orang-orang yang berada situasi terdesak adalah sah. Maka dari itu, perlu diupayakan penyelesaian konflik secara non kekerasan. Kelompok ekologi berniat guna mewujudkan suatu kedamaian personal, komunitas, dan global yang abadi.

## 5. Desentralisasi

Berangkat dari asumsi bahwa sentralisasi kesejahteraan dan kekuasaan berkontribusi besar terhadap ketidakadilan ekonomi, perusakan lingkungan, dan militerisasi, politik hijau mendukung upaya restrukturisasi institusi-institusi politik, sosial dan ekonomi yang dikuasai oleh segelintir orang kuat (oligarki). Institusi tersebut akan diubah dengan sistem yang lebih demokrasi dengan postur birokrasi yang ramping. Pengambilan keputusan harus sebisa mungkin berada pada tingkat individu dan lokal.

## 6. Ekonomi Berbasis Komunikasi dan Berkeadilan

Pandangan politik hijau memandang penting untuk menerapkan suatu sistem ekonomi yang berkelanjutan, yang bisa menciptakan lapangan kerja baru dan standard hidup yang baik untuk semua orang tanpa mengabaikan keseimbangan ekologis. Sistem ekonomi tersebut harus bisa memberikan sebuah kebanggaan terhadap pekerjaan “yang berarti”, sehingga bisa membiayai hidup secara berkeadilan sesuai dengan apa yang dikerjakan. Dalam hal ini mereka sangat membela jenis-jenis pekerjaan termarginalkan, tetapi sebenarnya sangat penting dalam menopang harmoni hidup dalam masyarakat. Sebagai, pekerjaan domestik dan pekerjaan menjaga kebersihan yang selama ini kurang dihargai. Ini perlu diarusutamakan dalam perspektif politik hijau.

## 7. Feminisme dan Kesetaraan Gender

Kaum ekologi menyadari sepenuhnya bahwa manusia mewarisi sistem sosial yang berdasarkan pada dominasi patriarki, baik dalam wilayah dan etika dominasi dan kontrol dengan cara berinteraksi lebih kooperatif. Artinya, perbedaan pendapat dan gender dihormati. Maka dari itu, nilai-nilai kemanusiaan seperti persamaan jenis kelamin, tanggung jawab *interpersonal* dan kejujuran harus dikembangkan dengan kesadaran moral. Manusia perlu mengingat bahwa proses yang menentukan keputusan

dan tindakan sama pentingnya dengan usaha penyelesaian dari apa yang diinginkan.

### **8. Penghormatan Terhadap Keberagaman**

Adanya keyakinan akan pentingnya keberagaman budaya, etnis, ras, agama dan kepercayaan spiritual mengimplikasikan promosi atas hubungan yang saling menghargai diantara keberbedaan tadi. Berangkat dari keyakinan ini, mereka percaya bahwa perbedaan-perbedaan yang ada harus pula tercermin dalam organisasi-organisasi dan badan-badan pengambilan keputusan. Karenanya, pandangan politik hijau sangat mendukung kemunculan pemimpin dari kalangan mereka yang selama ini terpinggirkan dari peran kepemimpinan, misalnya kaum perempuan.

### **9. Tanggung Jawab Personal dan Global**

Kaum ekologi mendukung tindakan individu untuk meningkatkan kesejahteraan hidup, akan tetapi tindakan tersebut tidak boleh mengabaikan keseimbangan ekologi dan harmoni sosial. Karenanya mereka mau bergabung dengan orang-orang dan organisasi yang mau memperjuangkan perdamaian abadi, keadilan sosial ekonomi, dan menjaga kelestarian bumi.

### **10. Fokus pada masa depan dan keberlanjutan**

Tindakan dan kebijakan kaum ekologi dimotivasi oleh tujuan jangka panjang. Mereka berjuang dalam perlindungan sumber daya alam yang berharga, mengamankan peraturan atau tidak melakukan semua pemborosan. Dengan mengembangkan sistem ekonomi berkelanjutan (*sustainable development*) yang tidak mengantungkan diri pada ekspansi untuk mampu bertahan hidup. Mereka pandangan yang mempunyai tujuan keuntungan jangka pendek atau berorientasi profit-tanpa memperhatikan dampak lingkungan. Caranya, dengan menjaga agar perkembangan ekonomi, penggunaan teknologi baru dan kebijakan fiskal ikut bertanggung jawab terhadap generasi mendatang yang akan mewarisi hasil dari tindakan saat ini.

## Teori Politik Hijau dalam Hubungan Internasional

Teori Hijau dalam hubungan internasional secara komprehensif dikembangkan oleh R. Eckersley, salah satu sarjana yang *concern* terhadap teoritisasi pemikiran politik hijau. Ia menyatakan bahwa teori hijau telah mengalami dua gelombang perubahan. Gelombang pertama teori hijau memfokuskan kepada irasionalitas dari permasalahan ekologi oleh pusat institusi-institusi sosial seperti negara dan pasar. Banyak dari para penteor politik hijau memilih cita-cita demokrasi akar rumput dan komunitas-komunitas keberlangsungan ekologi sebagai alternatif.<sup>22</sup>

Lebih jauh, Politik Hijau merupakan jenis politik sistem ketiga. Ketika sistem ketiga berkembang dalam bentuk sistem ekonomi informal, jaringan kerjasama non-makro organisme yang dikendalikan oleh negara, serta berfokus pada komunitas lokal yang semakin otonom, peran negara secara otomatis akan surut. Begitu pula perusahaan besar atau pasar yang beroperasi dalam sistem fungsional, bukan teritorial. Dari sudut pandang perusahaan raksasa, revitalisasi kehidupan teritorial berarti kehilangan pasar, sebagaimana halnya kehilangan pajak dari sudut pandang alat negara.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Eckersley, R, "Green Theory" dalam Dunne, Tim, Milja Kurki & Steve Smith (2006), *International Relation Theories; Discipline and Diversity*, (London;Oxford University Press), 252.

<sup>23</sup> Bjorn Hettne, *Op. cit*, 377-388. Lebih lanjut, perbedaan antara prinsip pembangunan fungsioanal dan teritorial adalah: *Fungsional* berhubungan dengan pola pembangunan yang umum dipakai, yaitu pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan oleh spesialis dan pembagian kerja antar wilayah yang akhirnya diperhitungkan adalah jumlah pada hasil pada level perekonomian nasioanal, atau menurut sebageian pandangan perekonomian dunia. Masalah keterbelakangan regioanal dilihat atau sebagai ketidakseimbangan sementara atau pengorbanan yang perlu untuk mencapai pertumbuhan secara keseluruhan. Sementra prinsip *Teritorial* sebaliknya, memberi prioritas pada region dan komunitas lokal. Pembangunan mereka harus sesuai dengan ciri-ciri ekologis dan kultural tiap-tiap region.

Pandangan ini didasarkan pada konsepsi desentralisasi yang didengungkan oleh aliran hijau. Konsepsi desentralisasi mereka mencerminkan perbedaan mendasar dari perspektif lainnya dalam memahami sistem negara dan strukturnya. Hal ini seperti yang dilontarkan oleh Theodore Roszak dalam bukunya yang cukup memengaruhi pandangan hijau, *Person/Planet*,<sup>24</sup>

*"...both person and planet are threatened by the same enemy, The Bigness of Things. The bigness of industrial structures, world markets, financial networks, mass political organizations, public institutions, military establishment, cities, bureaucracies. It is the insensitive colossalism of these system that endangers the rights of the person and the right of the planet. The inordinate scale of industrial enterprise that must grind people into statistical grist for the market place and the work force simultaneously shatters the biosphere in a thousand unforeseen ways."*

Menurut pandangan hijau, segala kondisi seperti di atas harus diubah dengan pendekatan desentralisasi dan masyarakat demokratis, yang menempatkan kekuasaan dari institusi politik, ekonomi dan sosial dalam skala yang paling kecil (*closest to home*) sehingga menjadi lebih efisien dan praktis. Hal ini bisa dilihat dari manifesto *German Greens* yang tertera dalam *basic rules*, bahwa prinsip dasar dari politik hijau adalah desentralisasi pada unit-unit basis (komunitas lokal atau distrik) yang harus diberi otonomi lebih luas dan hak atas pemerintahan sendiri.<sup>25</sup> Artinya, dalam hal ini, peran negara akan diminimalisasi dengan sendirinya ketika lokalitas menjadi basis utama dalam membentuk mekanisme sistem dan struktur sosial, politik dan ekonomi.

Disamping itu pemikiran hijau dalam proyek-proyeknya juga menolak bentuk integrasi dalam level dunia. Menurut Rudolf Bahro, pemimpin kharismatik Partai Hijau Jerman

---

<sup>24</sup> Roszak, Theodore, *Person/Plane*. (Garden City, NY: Doubleday), 33, seperti yang dikutip dari Goodin, Robert E. 1992, 147.

<sup>25</sup> *Ibid*, 148.

“tidak ada keselamatan tanpa pembongkaran kompleksitas”. Jadi, mereka menekankan pembangunan teritorial dengan fokus lokal, yang kurang lebih sehaluan dengan tradisi pembangunan *civil society*.

Hal ini tentu sesuai dengan slogan yang didengungkan oleh gerakan politik hijau sendiri, yaitu “*Think Globally, Act Locally!*”. Dalam perspektif ini, mereka independen secara artifisial dari batasan-batasan nasional. Mereka menamakan hal ini dengan *anti-statist*. Akan tetapi menjadi *anti-statist* bukan berarti sama dengan menjadi “*internationalist*”, seperti yang terjadi pada konferensi Stockholm yang menginginkan adanya organisasi internasional yang kuat untuk bisa melindungi dan mengatasi permasalahan lingkungan global.

Sebaliknya, pemikiran hijau lebih fokus pada bagaimana merekonstruksi *world order* tanpa harus membuat Negara-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat. Karakter pemikiran Hijau yang anti-statisme didasarkan pada usulan yang tidak menginginkan adanya institusi politik *suprastate* yang kuat tetapi lebih menginginkan untuk meminimalisir kekuasaan negara dengan menyerahkan kekuasaan pada unit yang lebih kecil, yang diorganisir oleh *bioregions* atau sejenisnya. Oleh karena itu, pandangan ini yang menjadikan pemikiran hijau memiliki slogan “*think globally, act locally*”.

Gelombang kedua dari teori politik hijau menjadi lebih transnasional dan kosmopolit dalam orientasinya. Teori ini lebih menarik perhatian dengan pemikiran ulang yang kritis. Selain itu, teori ini dalam beberapa hal bersifat transnasional dalam sekup institusi dan konsep politik, yaitu dengan tidak meninggalkan kerangka berpikir permasalahan lingkungan itu sendiri. Pada gelombang kedua ini pemikiran politik hijau telah menghasilkan sesuatu yang baru, antara lain; transnasionalisasi, deterritorialisasi atau konseptualisasi global dari keadilan lingkungan (e.g Low and Gleeson 1998), hak-hak lingkungan (e.g. Hayward 2005), *environmental democracy* (Doherty and de

Geus, 1996), aktivisme lingkungan (Wapner 1998), *environmental citizenship* (Barry 1999; Dobson 2003) dan Negara hijau (e.g. Eckersley 2004; Barry and Eckersley 2005). Di samping itu, juga ada peningkatan hubungan dari teori politik hijau melalui beberapa perdebatan utama dengan teori hubungan internasional normatif. Sebagian teori utama berkonsentrasi pada hak asasi manusia, kosmopolitanisme demokratik, *transnational civil society*, dan *transnational public spheres*.<sup>26</sup>

Lebih lanjut, Teori Hijau—dalam Hubungan internasional disebut dengan Teori Hijau Hubungan Internasional (*Green IR Theory*)—memiliki karakteristik yang kurang lebih sama dengan teori-teori HI yang baru muncul. Teori-teori baru tersebut dikenal dengan *third debate paradigm* (juga kadang-kadang disebut sebagai 'fourth debate'). Teori ini secara umum kritis, berorientasi pada permasalahan, interdisipliner, dan secara keseluruhan *unapologetic* terhadap orientasi normatif mereka secara eksplisit

Menurut pandangan Eckersley, Teori hijau HI dibedakan menjadi dua kategori. *Pertama*, sayap *International Political Economy* (IPE) yang menawarkan analisis alternatif bagi permasalahan-permasalahan ekologi global pada rejim teori. *Kedua*, sayap "Kosmopolitanisme Hijau" yang mengartikulasikan norma baru bagi keadilan lingkungan dan demokrasi hijau pada semua level pemerintahan.

Kedua kategori ini berhubungan dengan teori kritis, sebagian pada neo-Gramscian yang digagas oleh teorisi ekonomi politik Robert Cox, dan diskursus etika kosmopolitan seperti yang dikembangkan oleh Jurgen Habermas. Oleh karena itu, perdebatan teori bisa ditempatkan secara jelas disamping rasionalisme kritis versus konstruktivisme dalam perdebatan teori hubungan internasional.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> *Op. cit*, Eckersley R., 252.

<sup>27</sup> *Ibid*, 255.

## Teori Hijau sebagai Alternatif

Dua pendekatan rasionalis yang dominan dalam teori hubungan internasional—neorealisme dan neoliberalisme—sudah cenderung untuk menggunakan permasalahan lingkungan sebagai 'ranah isu baru'. Hal ini cukup menarik perhatian yang sama dengan kerangka kerja teori yang ada sebelumnya daripada sebagai model analisis baru yang lebih normatif.

Bagi kaum neorealis atau realisme struktural, masalah lingkungan masih diposisikan pada level '*low politics*', sedangkan bagi kaum neoliberal, isu lingkungan sudah lebih jauh membawa pada kerja-kerja empiris pada tingkat rejim di luar batas nasional dan permasalahan-permasalahan global lainnya. Kelompok pemikiran ini sudah memiliki kerangka analisa untuk membantu memprediksi apa yang harus dan tidak harus dilakukan oleh negara, seperti kerjasama dalam reformasi dan mengembangkan rejim lingkungan yang efektif.

Secara umum, pendekatan rasionalis dominan belum secara eksplisit mengikat dalam teori normatif. Kendati, neoliberalisme secara terbuka sudah menyatakan pemecahan masalah mereka yang reformis dibandingkan kritis dan orientatif.<sup>28</sup> Penelitian utama mereka bertujuan untuk mengobservasi, menjelaskan dan memprediksi perilaku negara-negara dalam hubungan antar bangsa. Berangkat dari asumsi tersebut, menurut Eckersley kedua kategori teori hijau hubungan internasional—sayap ekonomi politik dan normatif—sudah mengkritisi pendekatan rasionalis dominan dalam empat hal.<sup>29</sup>

*Pertama*, Kritik Hijau ditujukan langsung pada tujuan-tujuan normatif pendekatan rasionalisme, dilihat dari asumsi-asumsi permasalahan lingkungan dan nilai-nilai etika yang implisit dalam analisis neorealisme dan neoliberalisme. Dalam hal ini, Teori Hijau HI mengambil pernyataan Robert Cox

---

<sup>28</sup> Haas, Keohane, & Levy, *Ibid*, 7.

<sup>29</sup> *Ibid*, 255-258.

bahwa '*theory is always for someone and some purpose*' (Cox, 1981). Sementara neorealisme, sebagian dikritik karena lebih cenderung melakukan normalisasi daripada menentang praktik-praktik eksploitasi lingkungan yang disponsori oleh negara.

Sebaliknya, neoliberalisme, dari tradisi berpikir Lockean, mencoba membuat rejim internasional dengan mempercayai bahwa 'eksploitasi rasional' terhadap alam, sekaligus sebagai sebuah '*tap*' (dalam menyediakan energi dan sumber daya alam lainnya) dan juga sebagai sebuah '*sink*' (melalui hasil asimilasi kotoran alam, lautan dan atmosfer) memerlukan perluasan dari pilihan-pilihan pembangunan sebuah negara. Kendati, kerangka pilihan rasional mereka secara langsung menyetujui instrumen yang digunakan terhadap dunia non-manusia dan menyisakan sedikit ruang gerak untuk mempromosikan 'identitas hijau' oleh aktor negara dan non negara.

Sederhananya, neoliberalisme secara langsung menerima kapitalisme pasar dan kedaulatan negara sebagai sesuatu yang '*given*' dalam proses negosiasi rejim internasional. Sementara, teori hijau HI, lebih fokus pada struktur sosial yang memiliki inisiatif terhadap konsep efektivitas pembangunan bagi lingkungan. Mereka juga setuju format baru perlawanan '*counter-hegemonic*' terhadap globalisasi ekonomi neoliberal. Sama halnya dengan *critical theory*, teori hijau mengutamakan peran agen dalam mentransformasikan struktur sosial, dalam hal ini, untuk mempromosikan keadilan lingkungan dan keberlanjutan.

*Kedua*, senada dengan teori kritis dan konstruktivisme, teori hijau juga menolak pendekatan rasionalisme yang menggunakan kerangka analisis dan kekuatan ekplanasi yang positivistik. Misalnya, neorealisme yang memprediksi kerjasama lingkungan antar negara akan lebih efektif jika dimotori oleh kehadiran negara hegemoni, sehingga kerjasama akan selalu terjaga melalui distribusi kekuasaan (dipahami dalam konteks distribusi *material capability*).

Sebaliknya, teori hijau memberikan catatan bahwa neorealisme memberikan tesis yang mentah dan belum utuh terha-

dap hitung-hitungan politik lingkungan antar bangsa. Kondisi ini bisa dilihat pada proses pembuatan perjanjian internasional di bidang lingkungan (misalnya proses ratifikasi protokol Kyoto), di mana sampai pada KTT Perubahan Iklim di Bali Desember 2007 lalu, Amerika Serikat masih belum mau menandatangani kesepakatan dalam pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor industri mereka. Bertitik pijak dari hal ini, teori hijau memandang realisme tidak mau menjelaskan mengapa dan bagaimana hal tersebut bisa terjadi.

*Ketiga*, Teori Hijau secara langsung mengkritisi agensi dan struktur sosial yang secara sistematis menolak negosiasi bagi pencerahan rejim lingkungan. Analisis kritis ini diaplikasikan tidak hanya terhadap inefektivitas rejim (misalnya: TTA – *Tropical Timber Agreement* yang hanya didominasi oleh industri kayu dan negara-negara yang terlibat dalam proses ekspor dan impor), tetapi juga hubungan yang *overlapping* antara rejim dan pemerintahan global secara umum.

Hal yang sama juga bisa dilihat dari rejim ekonomi internasional yang membayangi dan menafikkan keberadaan rejim lingkungan internasional. Dalam konteks ini, teori hijau mengalami perdebatan antara keinginan untuk mempengaruhi *World Trade Organization* (WTO) atau menawarkan institusi tandingan, seperti *World Environmental Organization* (WEO) untuk mengimbangi kekuatan WTO.

*Keempat*, Teori Hijau telah mengeksplorasi peran dari aktor non-negara dengan format 'deteritorialisasi' pemerintahan. Hal ini mencakup dari transnasionalisasi NGO bidang lingkungan sampai pada praktik pengelolaan industri swasta dan keuangan korporat, juga termasuk pada jaminan industri. Pemikiran baru ini telah menghasilkan gambaran kompleks terhadap pengelolaan lingkungan di tingkat global yang baru dan hybrid. Sementara itu, pola jaringan kerja memiliki otoritas diluar batas yuridiksi negara. Dalam beberapa hal, ini bisa memangkas pola hirarki pemerintahan tradisional yang merupakan tipologi dari sistem negara-bangsa.

## Kesimpulan

Sebagai kesimpulan, teori hijau menyadari ada hal yang lebih utama dari sekedar kerangka pikir *state-centric* dalam teori HI tradisional dan menawarkan analisis serta pandangan normatif baru bagi perubahan lingkungan global. Terlepas dari pihak yang pesimistik dengan pendekatan yang dinilai cukup utopis ini, tawaran dari pemikiran Teori Hijau tetap memberikan diskursus yang cukup menarik bagi penstudi-penstudi HI. Apalagi, permasalahan lingkungan sudah masuk ke ranah-ranah politik tingkat tinggi (*high politics*) dalam Hubungan Internasional. Dengan demikian, Teori Hijau benar-benar bisa menjadi alternatif dalam menjelaskan kompleksitas masalah lingkungan tersebut.

## Daftar Pustaka

- Adorno, Theodore, dan Marx Horkheimer, *Dialektika Pencerahan*, penterjemah, Ahmad Sahida (Yogyakarta: IRCISOD, 2002)
- Brownig, Gary (ed). *Understanding Contemporary Society: Theories and the Present* (London: SAGE Publication)
- Bryant, R. and Bailey, S. *Third World Political Ecology* (London: Routledge, 1997).
- Brown, Lester R, *Jangan biarkan bumi merana*, Laporan World watch Institute, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992).
- Burchill, Scoot & Andrew Linklater (ed.), *International Relation Theory* (New York: St. Martin's Press, 1996).
- Dunne, Tim, Milja Kurki & Steve Smith, *International Relation Theories; Discipline and Diversity*, (London: Oxford University Press, 2006).
- Eckersley, R. *The Green State: Rethinking Democracy and Sovereignty* (Cambridge MA: MIT Press, 2004).

- Frankland, E. Gene & Donal Schoomaker, *Between Protest and Power: The Green Party in Germany* (Oxford: Westview Press, 1992).
- Gale, F. P. & M'Gonigle, R. M. eds), *Nature, Production, Power: Towards an Ecological Political Economy* (Cheltenham: Edward Elgar, 2000).
- Goodin, Robert E. *Green Political Theory* (Cambridge: Polity Press).
- Hetne, Bjorn, *Teori Pembangunan dan Tiga Dunia*, Jakarta Gramedia Pustaka Utama, 1992).
- Клццпен, J. *Green Security or Militarised Environment* (Aldershot: Dartmouth, 1994).
- LaFerriere, E. and Stoett, P. J. *International Relations Theory and Ecological Thought: Towards a Synthesis* (London: Routledge, 1999).
- Paterson, M., *Understanding Global Environmental Politics: Domination, Accumulation, Resistance* (London: Palgrave, 2000).
- Princen, T., M. Maniates., and K. Conca (eds), *Confronting Consumption* (Cambridge MA: MIT Press, 2002).
- Paehlke, R. C., *Democracy's Dilemma: Environment, Social Equity and the Global Economy* (Cambridge: MIT Press, 2003).
- Patrik Sale, Kirk, *Revolusi Hijau: Sebuah Tinjauan Historis-krisis Gerakan Lingkungan Hidup di Amerika* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia).